Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 7 No 2 Tahun 2026

MODEL TATA KELOLA KOLABORATIF DESA WISATA AIK BERIK PADA KAWASAN GEOPARK AIR TERJUN BENANG KELAMBU

Ahmad Ramdani, Lalu Parhanuddin, Yogi Birrul Walid Sugandi
Program Studi Pariwisata, Fakultas Bahasa, Seni, dan Humaniora, Universitas Hamzanwadi

Email: ahmadramdani86080@gmail.com, laluparhanuddin@hamzanwadi.ac.id, yogi_birulwalod@hamzanwadi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis model tata kelola Desa Wisata Aik Berik pada kawasan Geopark Air Terjun Benang Kelambu serta mengidentifikasi peran dan hubungan antar pemangku kepentingan dengan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas unsur pemerintah desa, Pokdarwis, BUMDes, masyarakat lokal, dan pelaku usaha wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Desa Wisata Aik Berik memiliki karakter kolaboratif berbasis masyarakat. Pengelolaan melibatkan Pemerintah Desa, Pokdarwis, BUMDes, Gapoktan, masyarakat, pelaku usaha, serta pihak lain yang berkepentingan terhadap kawasan wisata. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan pendukung, sedangkan Pokdarwis lebih banyak menjalankan fungsi operasional dan pelayanan wisata. Masyarakat terlibat melalui jasa pemanduan, homestay, perdagangan, kuliner, transportasi, dan aktivitas pendukung lainnya. Prinsip geopark diterapkan melalui kegiatan penanaman pohon, edukasi lingkungan kepada wisatawan, dan pemeliharaan identitas budaya lokal. Namun, kolaborasi belum sepenuhnya terlembaga. Belum adanya Peraturan Desa khusus mengenai pengelolaan desa wisata menyebabkan pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi belum berjalan secara optimal. Kendala lain meliputi belum meratanya manfaat ekonomi, keterbatasan fasilitas kebersihan pada saat kunjungan meningkat, dan keterbatasan kemampuan bahasa asing pada sebagian pemandu. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi, koordinasi, kapasitas sumber daya manusia, fasilitas, dan mekanisme pemerataan manfaat menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat keberlanjutan tata kelola desa wisata.

***Kata kunci**: Desa Wisata Aik Berik; tata kelola kolaboratif; geopark; masyarakat lokal; pariwisata berkelanjutan.*

Article History
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Plagirism Checker No 237.784537
Copyright : Author
Publish by : Panorama

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Pengembangan desa wisata menempatkan sumber daya lokal, masyarakat, dan kelembagaan desa sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pariwisata. Desa wisata tidak hanya berfungsi sebagai ruang kunjungan wisatawan, tetapi juga sebagai ruang ekonomi dan sosial tempat masyarakat terlibat dalam penyediaan produk serta layanan wisata. Karena itu, keberhasilan pengembangan desa wisata tidak cukup diukur dari peningkatan kunjungan, tetapi juga dari kualitas tata kelola, partisipasi masyarakat, pemerataan manfaat, dan kemampuan menjaga

sumber daya alam serta budaya.

Dalam pengelolaan pariwisata, tata kelola berkembang dari pendekatan yang berpusat pada pemerintah menuju keterlibatan berbagai aktor. *Collaborative governance* menekankan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, organisasi, pelaku usaha, dan pihak lain untuk menangani persoalan publik yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja (Ansell & Gash, 2008; Yasintha, 2020). Dalam konteks desa wisata, pendekatan tersebut relevan karena kegiatan pariwisata melibatkan banyak kepentingan, mulai dari pelayanan wisata, pengelolaan lingkungan, ekonomi masyarakat, hingga pengembangan kelembagaan.

Desa Wisata Aik Berik di Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, memiliki posisi strategis dalam pengembangan pariwisata berbasis alam. Air Terjun Benang Kelambu menjadi salah satu daya tarik utama dan berada dalam konteks kawasan Geopark Rinjani. Desa ini juga memiliki berbagai daya tarik dan aktivitas wisata, termasuk Air Terjun Benang Stokel, Air Terjun Gunung Janggot, Aik Berik Geosoft Trekking, *Two Day Living in* Aik Berik, wisata madu trigona, wisata kopi, budidaya jamur, dan produk masyarakat. Dalam data penelitian, Aik Berik juga tercatat masuk 500 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia pada 2023 dan 50 Besar pada 2024 serta memperoleh Juara II kategori Amenitas Terbaik ADWI 2024.

Potensi tersebut diikuti oleh kebutuhan tata kelola yang mampu menghubungkan kepentingan pariwisata, masyarakat, ekonomi lokal, dan konservasi. Penelitian dalam skripsi ini menunjukkan adanya keterlibatan banyak aktor, tetapi juga menemukan persoalan koordinasi, pembagian kewenangan, kelembagaan formal, pemerataan manfaat ekonomi, fasilitas kebersihan, dan kapasitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut penting dikaji karena penelitian mengenai desa wisata sering berfokus pada pengembangan, pemasaran, dan potensi wisata, sedangkan kajian yang secara khusus melihat model tata kelola desa wisata dalam konteks kawasan geopark pada tingkat desa masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana model tata kelola Desa Wisata Aik Berik pada kawasan Geopark Air Terjun Benang Kelambu; dan (2) bagaimana peran dan hubungan antar pemangku kepentingan dengan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis model tata kelola, peran dan hubungan antaraktor, serta tantangan yang muncul dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat dan prinsip geopark.

KAJIAN LITERATUR

Tata Kelola Kolaboratif

Tata kelola merujuk pada proses pengaturan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya yang melibatkan berbagai pihak. Dalam pariwisata, tata kelola diperlukan untuk mengintegrasikan kepentingan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan aktor lain agar pengembangan destinasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Pendekatan *collaborative governance* menempatkan kerja sama antarpemangku kepentingan sebagai unsur penting dalam penyelesaian persoalan bersama (Ansell & Gash, 2008).

Kerangka tersebut membantu penelitian ini membaca hubungan antara Pemerintah Desa, Pokdarwis, BUMDes, Gapoktan, masyarakat, dan pelaku usaha. Fokus analisis tidak hanya pada keberadaan aktor, tetapi juga pada fungsi, hubungan, koordinasi, pembagian peran, serta kemampuan kelembagaan dalam mencapai tujuan bersama.

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 7 No 2 Tahun 2026

Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pariwisata berbasis masyarakat menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan kegiatan wisata. Masyarakat tidak hanya menerima dampak pariwisata, tetapi juga menyediakan layanan, produk, pengalaman, dan aktivitas ekonomi. Pendekatan ini relevan untuk Desa Wisata Aik Berik karena masyarakat terlibat dalam pemanduan, homestay, perdagangan, kuliner, transportasi, serta kegiatan kebersihan dan konservasi.

Geopark dan Keberlanjutan

Geopark mengintegrasikan warisan geologi, biodiversitas, budaya, konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, prinsip geopark digunakan untuk melihat apakah aktivitas wisata tidak hanya memanfaatkan daya tarik alam, tetapi juga menjaga lingkungan, memberikan edukasi, mempertahankan identitas budaya, dan membuka manfaat ekonomi bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma naturalistik dan interpretatif. Metode yang digunakan adalah studi kasus karena penelitian berfokus pada satu kasus spesifik, yaitu tata kelola Desa Wisata Aik Berik pada kawasan Geopark Air Terjun Benang Kelambu. Pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami hubungan antaraktor, mekanisme pengelolaan, bentuk kolaborasi, serta tantangan pengelolaan secara kontekstual (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018).

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposive berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan desa wisata. Skripsi mencatat delapan informan yang terdiri atas informan kunci, utama, dan pendukung. Informan mencakup Pemerintah Desa Aik Berik, Pokdarwis, BUMDes, masyarakat lokal, dan pelaku usaha wisata.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi, member check, dan audit trail. Dengan teknik tersebut, informasi dari wawancara dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumen yang tersedia.

Perlu dicatat bahwa data penelitian lebih banyak didominasi oleh wawancara. Dokumen yang dianalisis belum menyediakan data kuantitatif yang lengkap mengenai jumlah wisatawan, pendapatan masyarakat, jumlah pelaku usaha, dan dokumentasi observasi secara rinci. Karena itu, temuan artikel ini terutama menggambarkan pengalaman dan pandangan informan mengenai praktik tata kelola yang berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Desa Wisata Aik Berik

Desa Aik Berik berada di Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Profil Kecamatan Batukliang Utara Tahun 2024 yang digunakan dalam skripsi, luas Desa Aik Berik mencapai 41,87 km^2 atau sekitar 23,01 persen dari luas kecamatan. Jumlah penduduk pada 2023 tercatat 8.705 jiwa. Kondisi geografis desa di kawasan kaki Gunung Rinjani mendukung pengembangan wisata berbasis alam.

ISSN : 3031-5085

Potensi wisata Aik Berik mencakup sejumlah air terjun dan aktivitas berbasis sumber daya lokal. Dalam dokumen penelitian tercatat 13 unit homestay pada Jadesta. Observasi tahun 2026 dalam skripsi juga mengidentifikasi 26 pedagang kecil dan 10 restoran atau rumah makan. Angka tersebut digunakan sebagai informasi pendukung, bukan sebagai ukuran pasti seluruh pelaku usaha karena sumber dan periode datanya berbeda.

Model Tata Kelola Desa Wisata Aik Berik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Desa Wisata Aik Berik memiliki karakter tata kelola kolaboratif berbasis masyarakat. Pengelolaan tidak dijalankan oleh satu lembaga tunggal. Pemerintah Desa, Pokdarwis, BUMDes, Gapoktan, masyarakat lokal, pelaku usaha, dan otoritas lain memiliki fungsi yang saling berhubungan.

Pemerintah Desa menempati posisi sebagai fasilitator dan pendukung pengembangan pariwisata. Peran tersebut mencakup dukungan, koordinasi, dan fasilitasi kegiatan. Pokdarwis lebih banyak menjalankan fungsi operasional dan pelayanan wisata di lapangan. BUMDes berkaitan dengan pengembangan kegiatan ekonomi desa, sedangkan Gapoktan memiliki hubungan dengan pengelolaan kawasan Hutan

Kemasyarakatan. Masyarakat menjadi pelaku langsung melalui berbagai layanan wisata dan usaha lokal.

Pola tersebut menunjukkan pembagian fungsi, tetapi belum menghasilkan kelembagaan kolaboratif yang sepenuhnya formal. Belum adanya Peraturan Desa khusus tentang pengelolaan desa wisata menjadi salah satu temuan penting. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kejelasan pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi. Koordinasi Pemerintah Desa dan Pokdarwis juga belum berlangsung secara rutin. Pada tingkat pelaku usaha, komunikasi lebih sering terjadi secara informal atau ketika terdapat kegiatan dan persoalan tertentu.

Temuan ini sejalan dengan konsep collaborative governance karena pengelolaan melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Namun, keberadaan banyak aktor belum otomatis menghasilkan tata kelola yang efektif. Kolaborasi memerlukan struktur koordinasi, aturan, komunikasi, dan pembagian kewenangan yang jelas. Dalam konteks Aik Berik, unsur kolaborasi telah terbentuk secara praktik, tetapi penguatan kelembagaan masih diperlukan.

Peran dan Hubungan Antaraktor

Hubungan antaraktor dalam pengelolaan Aik Berik bersifat fungsional. Pemerintah Desa memberikan dukungan dan koordinasi. Pokdarwis menjalankan pelayanan wisata. BUMDes mendukung kegiatan ekonomi desa. Gapoktan berhubungan dengan pengelolaan kawasan hutan kemasyarakatan. Masyarakat dan pelaku usaha menyediakan berbagai layanan wisata.

Hubungan tersebut juga terlihat pada rantai layanan wisata. Pemandu dapat mengarahkan wisatawan ke tempat makan atau pedagang di sekitar kawasan. Pengelola homestay, pedagang, pelaku kuliner, dan penyedia transportasi memperoleh peluang ekonomi dari aktivitas kunjungan. Pola hubungan ini menunjukkan bahwa masyarakat menjadi bagian dari sistem pariwisata, bukan hanya penerima manfaat pasif.

Namun, hubungan antaraktor belum seluruhnya didukung forum koordinasi formal yang rutin. Hal ini menjadi titik lemah tata kelola. Komunikasi informal dapat membantu menyelesaikan persoalan sehari-hari, tetapi kurang memadai untuk perencanaan jangka panjang, evaluasi, pembagian kewenangan, dan pengambilan keputusan strategis.

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 7 No 2 Tahun 2026

Penerapan Prinsip Geopark

Pengelolaan wisata Aik Berik menunjukkan integrasi antara pariwisata, konservasi, edukasi, dan budaya. Kegiatan penanaman pohon melibatkan masyarakat, anak sekolah, dan pengelola. Pengelola juga memberikan edukasi kepada wisatawan mengenai pentingnya menjaga lanskap, *flora*, dan *fauna* kawasan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa konservasi tidak sepenuhnya dipisahkan dari kegiatan wisata.

Dimensi budaya juga terlihat melalui penggunaan pakaian adat dalam aktivitas wisata. Praktik tersebut memperkuat identitas lokal dalam pengalaman wisata. Dengan demikian, prinsip geopark dalam praktik Aik Berik tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan keindahan alam, tetapi juga dengan upaya menjaga lingkungan dan identitas budaya serta menghubungkannya dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Manfaat Ekonomi dan Kendala Pengelolaan

Pariwisata memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat melalui perdagangan, pemanduan, *homestay,* kuliner, transportasi, dan usaha kecil lainnya. Manfaat ekonomi cenderung meningkat ketika kunjungan wisatawan meningkat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat tersebut belum stabil dan belum merata antar pelaku usaha. Pendapatan masyarakat masih bergantung pada tingkat kunjungan.

Kendala lain muncul pada fasilitas kebersihan ketika terjadi lonjakan pengunjung. Keterbatasan tempat sampah dan fasilitas pendukung dapat memengaruhi kebersihan kawasan. Dari sisi sumber daya manusia, keterbatasan kemampuan bahasa asing pada sebagian pemandu menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan wisatawan mancanegara.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan tata kelola tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan. Kualitas layanan, kapasitas SDM, pemerataan manfaat, dan fasilitas pendukung juga menentukan efektivitas pengelolaan. Karena itu, penguatan tata kelola perlu dilakukan secara terpadu.

Sintesis Model Tata Kelola

Berdasarkan keseluruhan temuan, model tata kelola Aik Berik dapat dirumuskan sebagai tata kelola kolaboratif berbasis masyarakat dengan orientasi konservasi dan keberlanjutan. Model tersebut memiliki lima unsur utama: keterlibatan multipihak, pembagian fungsi antaraktor, partisipasi masyarakat, penerapan konservasi dan edukasi, serta pemanfaatan pariwisata sebagai peluang ekonomi.

Pada sisi lain, model tersebut masih berada dalam tahap penguatan kelembagaan. Regulasi formal, koordinasi rutin, kejelasan kewenangan, pemerataan manfaat ekonomi, fasilitas kebersihan, dan kapasitas SDM perlu diperkuat. Dengan demikian, karakter utama model Aik Berik bukan sekadar banyaknya aktor yang terlibat, tetapi adanya hubungan fungsional antaraktor yang telah berjalan secara praktik dan perlu ditingkatkan menjadi mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur.

ISSN : 3031-5085

Tabel 1. Ringkasan Model Tata Kelola Desa Wisata Aik Berik

Aktor	Fungsi Utama	Isu Penguatan
Pemerintah Desa	Fasilitator, pendukung, dan koordinator	Regulasi dan koordinasi rutin
Pokdarwis	Operasional dan pelayanan wisata	Kapasitas SDM dan koordinasi
BUMDes	Mendukung kegiatan ekonomi desa	Penguatan integrasi kelembagaan
Gapoktan	Berhubungan dengan pengelolaan kawasan HKm	Kejelasan hubungan kewenangan
Masyarakat dan pelaku usaha	Pemanduan, homestay, kuliner, perdagangan, transportasi	Pemerataan manfaat dan kualitas layanan

KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa model tata kelola Desa Wisata Aik Berik pada kawasan Geopark Air Terjun Benang Kelambu memiliki karakter tata kelola kolaboratif berbasis masyarakat. Pengelolaan melibatkan Pemerintah Desa, Pokdarwis, BUMDes, Gapoktan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang berkepentingan. Pemerintah Desa berfungsi sebagai fasilitator dan pendukung, Pokdarwis menjalankan fungsi operasional, sedangkan masyarakat menjadi pelaku langsung dalam berbagai kegiatan pelayanan dan ekonomi wisata.

Penerapan prinsip geopark terlihat melalui kegiatan konservasi, edukasi lingkungan, dan pemeliharaan identitas budaya. Aktivitas tersebut berjalan bersamaan dengan pemanfaatan pariwisata sebagai peluang ekonomi masyarakat. Namun, model tata kelola belum sepenuhnya optimal secara kelembagaan. Belum adanya Peraturan Desa khusus, koordinasi yang belum rutin, pembagian kewenangan yang belum sepenuhnya jelas, ketidakmerataan manfaat ekonomi, keterbatasan fasilitas kebersihan, dan keterbatasan kemampuan bahasa asing menjadi persoalan yang perlu ditangani.

Dengan demikian, penguatan tata kelola Aik Berik perlu diarahkan pada pembentukan dasar regulasi yang jelas, forum koordinasi multipihak yang lebih teratur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan fasilitas kebersihan, dan mekanisme yang lebih baik untuk memperluas manfaat ekonomi masyarakat. Artikel ini juga menegaskan bahwa keberlanjutan desa wisata pada kawasan geopark memerlukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelayanan wisata, pelestarian lingkungan, dan identitas budaya.

Implikasi

Secara praktis, Pemerintah Desa dan pengelola perlu memperjelas pembagian tugas serta kewenangan antaraktor. Koordinasi dapat diperkuat melalui forum bersama yang memiliki agenda perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyelesaian masalah. Kapasitas masyarakat perlu ditingkatkan melalui pelatihan pelayanan, pemanduan, bahasa asing, pengelolaan homestay, dan interpretasi lingkungan.

Dari sisi keberlanjutan, kegiatan konservasi dan edukasi perlu dipertahankan dan diintegrasikan dengan pelayanan wisata. Pengelola juga perlu memperkuat fasilitas kebersihan terutama pada periode kunjungan tinggi. Untuk aspek ekonomi, diperlukan mekanisme yang dapat memperluas akses masyarakat terhadap peluang usaha dan memperkuat keterkaitan antar pelaku dalam rantai layanan wisata.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian memiliki keterbatasan karena data yang tersedia didominasi oleh hasil wawancara. Dokumen yang dianalisis belum menyediakan data kuantitatif yang lengkap mengenai jumlah wisatawan, pendapatan masyarakat, jumlah pelaku usaha, dan dokumentasi observasi secara rinci. Karena itu, penelitian ini belum dapat mengukur secara objektif nominal pendapatan, proporsi pembagian manfaat ekonomi, atau kontribusi ekonomi pariwisata. Penelitian selanjutnya dapat melengkapi aspek tersebut dengan data keuangan, statistik kunjungan, dokumen kelembagaan, dan pengukuran distribusi manfaat ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Bakti, B., Mahmud, L. O., Unga, W. O. H., Yusnita, Y., I. P., & Putri, R. A. (2025). Pendekatan ekowisata berbasis komunitas untuk penguatan tata kelola berkelanjutan BUMDes Air Terjun Moramo. Journal Publicuho, 8(4), 3109–3122. https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i4.1079

Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder dalam pembangunan berkelanjutan sektor pariwisata di Kebun Raya Cibinong. INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia, 4(2), 221–234. https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v4i2.179

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). The SAGE handbook of qualitative research (5th ed.). SAGE Publications.

Imtiyaza, N., Astuti, R. S., & Kismartini. (2024). Collaborative governance dalam pengembangan desa wisata Kaliwlingi. Jurnal Mahasiswa, Universitas Diponegoro.

Kanita, N., Widowati, N., & Maesaroh. (2023). Collaborative governance dalam pengembangan wisata Goa Pindul. Journal of Public Policy and Management Review, 12(2).

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Riyanto, A., Alfirdaus, L. K., & Setiyono, B. (2024). Tantangan dan hambatan collaborative governance di Geopark Kebumen. Journal of Politic and Government Studies, 14(1).

Safitri, A., Salahudin, & Sihidi, I. T. (2021). Tata kelola pengembangan pariwisata: Sebuah kajian pustaka terstruktur. Jurnal Ilmu Administrasi, 18(2).

Stahl, N. A., & King, J. R. (2020). Expanding approaches to trustworthiness in qualitative research. The Qualitative Report, 25(1), 26–38. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2020.4186

Sugiyono. (2023). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.

Yasintha, P. N. (2020). Tata kelola kolaboratif dalam penyelesaian masalah publik dan pengembangan pariwisata. Jurnal Administrasi Publik, 11(2), 89–102.

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.